

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agustino, Leo, 2009, *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- _____, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal Edisi Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Apeldorn, L.J. van, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 29 (Penerjemah Oetarid Sadino)*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Arifin, Firmansyah, *et all*, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- _____, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Ed. 2, Cet. ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ed. 1, Cet. ke-5, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2015, *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Setara Press, Malang.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Atmadja, I Dewa Gede, 2012, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press, Malang.

- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia – Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 1972, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cetakan ke-27, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gaffar, Jenedjri M., 2013, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2013, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Gautama, Sudargo, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1976, *Apakah the Rule of Law*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Nagara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2007, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2016, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori dan Praktik Di Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Indroharto, 1984, *Rangkuman Asas-asas Umum Tata Usaha Negara*, Tanpa Penerbit, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jilid I, cet. 9, Balai Pustaka, Jakarta.
- Katz, Richard S., William Crotty, 2006, *Handbook of Party Politics*, Sage Publication, London.
- Kelsen, Hans, 2009, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, penerjemah: Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Kusnardi, Mohd., Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Lutfi, Mustafa, 2010, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia (Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi)*, UII Press, Yogyakarta.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

_____, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Mahfud, Moh., MD, 2011, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislator ke Positive Legislator*, Konstitusi Press, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.

_____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Pertama*, Cet. ke-1, Kencana, Jakarta.

Maskur, Muhammad Azil, *et all*, 2017, *Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum, Prosiding Seminar Nasional*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Mawardi, Irvan, 2014, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada (Mewujudkan Electoral Justice dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis)*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

_____, 2012, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet.1, Liberty, Yogyakarta.

- Prodjodikoro, Wirjono, 1983, *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat.
- R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Wiryono, 2013, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Ed. Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cet. ke-3, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Saleh, Roeslan, 1979, *Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perundang-Undangan*, Aksara Baru, Jakarta.
- Salman. S, H.R. Otje, Anthon F.S., *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Setiono, Joko, 2015, *Materi Kuliah Teori dan Hukum Konstitusi*, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soehino, 2003, *Hukum Tata Negara (Proyek Percontohan Otonomi Daerah, Peletakan Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, dan Rekomendasai Kebijakan serta Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Ed. Pertama, Cet. Pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemardjono, Maria S.W., 2014, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Syahrani, Ridwan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2011, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Edisi Pertama, Cet. ke-1, Kencana, Jakarta.

Tauda, Gunawan A., 2012, *Komisi Negara Independen, Eksistensi Independet Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Press, Yogyakarta.

Thalib, Dahlan, 1993, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Edisi Kedua, Cet. Pertama, Liberty, Yogyakarta.

_____, Jazim Hamidi, *et all*, 2003, *Teori dan Hukum Konsitusi*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Utrecht, E., 1959, *Pengantar dalam Hukum Indonesia, cetakan ke-6*, PT. Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta.

Wahjono, Padmo, 1991, *Membudayakan UUD 1945*, Ind-Hild Co, Jakarta.

Yamin, Muh., 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Tesis, Laporan Penelitian

Abdullah, “Konstitusionalitas Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tahun 2013.

Supriadi, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah”, *Laporan Penelitian*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tahun 2005.

Tandiasa, Viktor Santoso, “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi Pascaputusan Perkara 97/PUU-XI/2013”, *Tesis*, Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tahun 2014.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3810).

- Undang-Undang No. 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3959).
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4277).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4311).
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4316).
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437).
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4721).
- Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4924).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5226).
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5246).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5316).

Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5586).

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5588).

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5676).

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5898).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5588).

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3847).

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.

D. Putusan-Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 072-073/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-I/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIII/2015.

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 63/Pid/TPK/2014/PT.DKI.

Putusan Mahkamah Agung No. 336 K/Pid.Sus/2015.

E. Internet

<http://www.kbbi.web.id>

<http://nasionalkompas.com>